

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti baru dalam pembuktian suatu perkara pidana korupsi.
- b. Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apa bila dapat di akses, di jamin keaslian dan keutuhannya.
- c. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam perkara pidana korupsi selama bisa di peroleh dan di buktikan dalam persidangan perkara korupsi.
- d. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sangat membantu aparat penegak hukum untuk menggungkap suatu tindak pidana korupsi.

B. Saran

Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Advokat untuk memahami tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan perkembangan penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi, agar mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi.

DAFTAR PUTAKA

Buku-buku :

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan* (Edisi Revisi), Djambatan, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman Telp (0274) 868535 Fax 0274 865572

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET. 214 /O.4.14/Fs/07/2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANTA, SH.
NIP : 19710713 199803 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MICHAEL JACKSON NAKAMNANU
No Mahasiswa : 10851
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jurusan : Hukum

Yang bersangkutan dalam rangka Penulisan Hukum/Skripsi telah melakukan penelitian dengan judul "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi" pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 26 Juli 2016

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



YULIANTA, SH.

Jaksa Madya Nip. 19710713 199803 1 002



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jl. Merapi Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : www.pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/2415 /VI/KUM.07.10/2016

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

“MICHAEL JACKSON NAKAMNANU”

No. Mahasiswa : 120510851
Jurusan : S1 Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Juni 2016 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Juni 2016

PANITERA



IBNU FAUZI, S.H., M.H.

NIP. 19610806 198903 1 010